



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179

Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR : 208 /UN9.1.2.4/DT/2018

tentang

PENGANGKATAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA  
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan pembimbingan mahasiswa perlu dibimbing dan diarahkan sesuai dengan bidang ilmu, sehubungan dengan itu maka perlu ditetapkan dan ditugaskan dosen untuk pembimbingnya;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- MENINGAT : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010, tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Keputusan Mendikbud RI No. 232/U/2000, tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Rektor Unsri No. 6092/D/T/K-N/2011, perihal Pemanjangan Ijin Program Studi Ilmu Hukum Jenjang S-3 di Universitas Sriwijaya.
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 3808/UN9/KP/2011 tanggal 3 November 2011, tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya No. 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas 2016-2020.
9. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 442/UN9.1.2.4/DT/2012 tanggal 20 Juni 2012, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Program Doktor (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN  
Pertama : Menunjuk Promotor dan Co-Promotor mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum sebagai berikut:

| NAMA / NIM                           | NAMA DOSEN PEMBIMBING  |
|--------------------------------------|--|
| Abdul Latif Mahfuz<br>02013681520002 | Promotor : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.<br>Co-Promotor : Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. |

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 31 Agustus 2018  
Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

Tembusan :

1. Yth. Rektor Unsri (sebagai laporan)
2. Yth. Wakil Dekan I, II, dan III FH Unsri
3. Yth. Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum FH Unsri
4. Yang bersangkutan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR 0312/UN9.FH/TU.SK/2021

TENTANG

TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA/PROMOSI GELAR DOKTOR  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh ujian disertasi terbuka;
- b. bahwa untuk ujian disertasi terbuka tersebut perlu ditetapkan dan diangkat tim penguji ujian disertasi terbuka yang akan dilaksanakan pada tanggal **28 Juni 2021** bertempat di FH Tower Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan Keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Mendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 3808/UN9/KP/2011 tanggal 3 November Tahun 2011, tentang Pengalihan Status (Kedudukan) Pengelolaan Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya ke Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK.KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 0003/UN9.FH/TU.SK/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 442/UN9.1.2.4/DT/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Program Doktor (S3) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Peraturan Dekan Nomor 336/UN9.1.2/2013 tentang Pedoman Sidang Terbuka Gelar Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim penguji untuk menguji mahasiswa:  
Nama : Abdul Latif Mahfuz  
NIM : 02013681520002  
Judul Disertasi : Penerapan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan Untuk Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank Berbasis Keadilan Konsumerisme;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk kegiatan tersebut;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Juni 2021



Dekan,  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001

Tembusan:

1. Rektor;
2. Wakil Dekan I, II, & III;
3. Korprodi Doktor Ilmu Hukum;
4. Arsip.

Lampiran I Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Nomor : 0312/UN9.FH/TU.SK/2021  
Tanggal : 23 Juni 2021  
Tentang : Tim Penguji Ujian Disertasi Terbuka/Promosi  
Gelar Doktor Mahasiswa Program Studi  
Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

**SUSUNAN TIM PENGUJI UJIAN DISERTASI TERBUKA/  
PROMOSI GELAR DOKTOR ATAS NAMA ABDUL LATIF MAHFUZ**

**Hari/Tanggal: Senin, 28 Juni 2021**

**Pukul: 09.00 s.d 11.30 WIB**

**Tempat: FH Tower Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang**

Ketua : Dr. Febrian, S.H., M.S. (Dekan)  
Sekretaris : Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H. (KPS)

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. (Promotor)  
2. Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. (Co-Promotor)  
3. Dr. Happy Warsito, S.H., M.Sc. (Dosen FH Unsri)  
4. Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum. (Dosen FH Unsri)  
5. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. (Dosen FH Unsri)  
6. Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. (Dosen FH UGM)



## HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Abdul Latif Mahfuz  
NIM : 02013681520002  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum

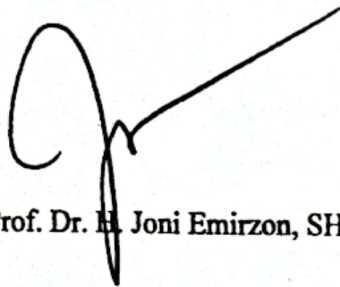
Judul Disertasi :

**PENERAPAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM  
OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN  
JASA KEUANGAN BANK BERBASIS KEADILAN KONSUMERISME**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Pada Hari Senin, Tanggal 28, Bulan Juni, Tahun 2021  
Pukul 09.00 WIB, Di Ruang Sidang Doktor  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Menyetujui:

Promotor

Co-Promotor



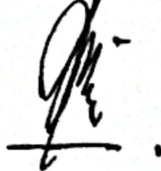
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, SH., M.Hum.



Dr. Hj. Annalisa Y, SH., M.Hum.

Mengetahui:

Ketua Program Studi  
Doktor Ilmu Hukum



Dr. H. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya











Dr. Febrian, SH., MS  
NIP. 196201311989031001

BALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Disertasi :  
**PENERAPAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM  
OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN  
JASA KEUANGAN BANK BERBASIS KEADILAN KONSUMERIAL**

Oleh:  
**Abdul Latif Mahfuz**  
NIM : 02011608152000

Disertasi ini telah diujikan dan dinyatakan lulus  
pada Hari Senin, Tanggal 28, Bulan Juni, Tahun 2021  
serta telah diperbaiki berdasarkan saran dan koreksi dari Tim Penguji

| Tim Penguji                           | Tanda Tangan  |
|---------------------------------------|---|
| 1. Dr. Febrina, SH,MS.                | (Ketua)         |
| 2. Dr. H. KN Sofyan Hasan, SH,MH      | (Sekretaris)   |
| 3. Prof. Dr.H. Joni Emirzon, SH,M.Hum | (Promotor)     |
| 4. Dr. Hj. Annalisa Y, SH,M.Hum       | (Co-Promotor)  |
| 5. Dr. Firman Muntaqo, SH,M.Hum       | (Penguji)      |
| 6. Dr. M. Syaifuddin, SH,M.Hum        | (Penguji)      |
| 7. Dr. Happy Warsito, SH,M.Sc         | (Penguji)      |
| 8. Prof. Dr. Nindyo Pramono, SH,MS    | (Penguji)      |

**PENERAPAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM  
OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PERLINDUNGAN  
KONSUMEN JASA KEUANGAN BANK  
BERBASIS KEADILAN KONSUMERISME**

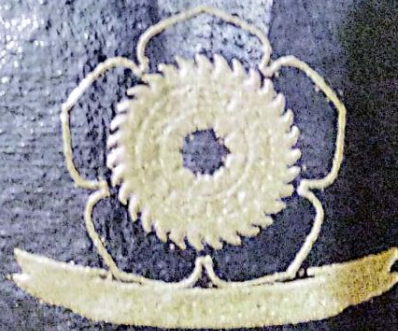
**DISERTASI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Doktor (Dr)  
Bidang Ilmu Hukum Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Dipertahabkan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka  
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Pada Hari Senin, Tanggal 28 Juni 2021  
Pukul 09.00 WIB, Di Ruang Sidang Doktor  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh**

**ABDUL LATIF MAHPUR**

**NIM. 02013681520002**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**JUNI 2021**

**PENERAPAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM  
OTORITAS JASA KEUANGAN UNTUK PERLINDUNGAN  
KONSUMEN JASA KEUANGAN BANK  
BERBASIS KEADILAN KONSUMERISME**

**DISERTASI**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Doktor (Dr)  
Bidang Ilmu Hukum Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Dipertahankan Dihadapan Sidang Akademik Terbuka  
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
Pada Hari Senin, Tanggal 28 Juni 2021  
Pukul 09.00 WIB, Di Ruang Sidang Doktor  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**ABDUL LATIF MAHFUZ**

**NIM. 02013681520002**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
JUNI 2021**



## ABSTRAK

Salah satu tujuan dari didirikannya Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah untuk melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan. Dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, Otoritas jasa Keuangan sangat tergantung pada perundang-undangan yang terkait beserta aturan pelaksanaannya, oleh karenanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Otoritas Jasa Keuangan harus selalu dijaga dengan adanya perlindungan terhadap konsumen jasa keuangan khususnya bank yang diberikan oleh Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Tujuan penelitian ini adalah akan menjawab permasalahan bagaimana penerapan wewenang dan tanggung jawab hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mewujudkan perlindungan konsumen jasa keuangan bank, serta bagaimana kelemahan pengaturan wewenang dan tanggungjawab hukum Otoritas Jasa keuangan tersebut dan bagaimana konsep ideal pengaturan tanggung jawab hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen jasa keuangan bank.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), dengan bentuk penelitian berupa penelitian preskriptif, yaitu untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan ketentuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tujuan untuk melindungi kepentingan konsumen masih banyak menemui kendala, dikarenakan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan memiliki beberapa kelemahan. Pertama, UU Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi sumber hukum utama perlindungan konsumen sehingga menimbulkan dualisme hukum perlindungan konsumen. Kedua, UU OJK tidak bisa disebut Undang-Undang yang ideal karena masih harus disinkronkan dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Bank Indonesia dikarenakan masih banyak terdapat kompleksitas pengaturan antar undang-undang. Ketiga, Konsep ideal pengaturan wewenang dan tanggung jawab hukum Otoritas Jasa Keuangan harus berlandaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan menjadikan undang-undang Otoritas Jasa Keuangan menjadi sumber hukum utama dalam perlindungan konsumen jasa keuangan bank serta diperlukan penyempurnaan agar Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia bisa lebih fokus menangani jasa keuangan bank.

Untuk mewujudkan perlindungan konsumen yang berkepastian hukum berbasis keadilan konsumerisme dimasa datang, UU OJK harus dilakukan penyesuaian agar ketentuan terkait perlindungan konsumen dapat diatur dan dimasukkan dalam aturan setingkat Undang-Undang. Dan perlunya dibentuk sebuah lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang khusus menangani satu lembaga keuangan yang disebut Otoritas Jasa Keuangan Bank.

**Kata Kunci:** otoritas jasa keuangan; perlindungan konsumen; kepastian hukum; dan keadilan konsumerisme.

## ABSTRACT

*One of the goals of the establishment of the Financial Services Authority in Indonesia is to protect the interests of financial services Authority is very public trust in the Financial Authority institutions must always be maintained with the protection of financial service customers. In carrying out its regulatory and supervisory functions, the Financial Services Authority is very dependent on the relevant legislation and its implementing regulations. Therefore, public trust in the Financial Services Authority institutions must always be maintained with the protection of financial service consumers, especially banks, provided by the Financial Services Authority Law.*

*This research will answer the question of whether the Financial Services Authority Law provides protection with legal certainty and justice to customers, and how to realize consumer protection with legal certainty in the future in order to support the objectives of the Indonesia Financial Services Authority to protect consumer interest based on Pancasila and the 1945 Constitution.*

*This type of research is normative law research or also known as library research, with the form of research in the form of prescriptive research, which is to get suggestions about what to do to solve certain problems.*

*Based on the research results, the provisions of the Financial Services Authority Law related to the purpose of protecting the interests of consumers still encounter many obstacles, because the Financial Services Authority Law has several weaknesses. First, the Financial Services Authority Law has not become the main source of law for consumer protection, thus giving rise to dualism of consumer protection laws. Second, the OJK Law cannot be called an ideal law because it still has to be synchronized with the provisions in the Banking Law and Indonesian Bank Act. Third, the OJK Law is deemed not to meet legal needs in society because it has not regulated: (i) electronic banking services (electronic banking), (ii) bank responsibility for consumer losses due to illegal acts by bank managers and/or employees, (iii) how to settle consumer complaint and disputes with legal protection to bank customers. (iv) the legal responsibility of the Financial Services Authority itself is related if it is unable to provide legal protection to consumers of bank financial services.*

*To realize consumer protection with legal certainty based on consumer justice in the future, the OJK Law must be adjusted so that provisions related to consumer protection can be included in regulations at the level of law. And it is necessary to establish a Financial Services Authority institution that specifically handles a financial institution called the Bank Financial Services Authority*

**Keywords:** *financial services authority; consumer protection; legal certainty; and consumerism justice.*

## DAFTAR ISI

|                                      | Halaman |
|--------------------------------------|---------|
| HALAMAN JUDUL .....                  | i       |
| HALAMAN PENGESAHAN .....             | ii      |
| HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI..... | iii     |
| HALAMAN PERNYATAAN .....             | iv      |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....            | v       |
| ABSTRAK.....                         | vi      |
| ABSTRACT .....                       | vii     |
| RINGKASAN.....                       | viii    |
| SUMMARY .....                        | xviii   |
| KATA PENGANTAR .....                 | xxviii  |
| RIWAYAT HIDUP .....                  | xxxiii  |
| DAFTAR ISI .....                     | xxxv    |
| DAFTAR TABEL .....                   | xlv     |
| DAFTAR BAGAN.....                    | xlvi    |
| DAFTAR SINGKATAN .....               | xlvii   |
| BAB I PENDAHULUAN .....              | 1       |
| A. Latar Belakang .....              | 1       |
| B. Perumusan Masalah .....           | 13      |
| C. Tujuan Penelitian .....           | 13      |

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| D. Manfaat Penelitian .....          | 14 |
| E. Keaslian Penelitian .....         | 18 |
| F. Kerangka Teori .....              | 26 |
| F.1 Grand Theory .....               | 27 |
| a. Teori Keadilan .....              | 28 |
| b. Teori Kekuasaan Negara .....      | 30 |
| F.2 Middle Theory .....              | 33 |
| a. Teori Perlindungan Hukum .....    | 34 |
| b. Teori Wewenang .....              | 39 |
| c. Teori Tanggung Jawab Negara ..... | 41 |
| d. Teori Perlindungan Konsumen ..... | 42 |
| F.3 Applied Theory .....             | 44 |
| a. Teori Pengawasan .....            | 46 |
| b. Teori Harmonisasi Hukum .....     | 48 |
| c. Teori Tanggung Jawab Hukum .....  | 49 |
| d. Teori Perjanjian .....            | 53 |
| G. Definsi Konseptual .....          | 63 |
| 1. Wewenang .....                    | 63 |
| 2. Tanggung Jawab Hukum .....        | 65 |
| 3. Otoritas Jasa Keuangan .....      | 66 |
| 4. Perlindungan Konsumen .....       | 68 |
| 5. Konsumen Jasa Keuangan Bank ..... | 79 |

|   |     |
|---|-----|
| 6. Jasa Keuangan Bank .....   | 81  |
| 7. Keadilan Konsumerisme .....  | 84  |
| H. Metode Penelitian .....  | 94  |
| 1. Tipe Penelitian .....  | 94  |
| 2. Pendekatan Penelitian .....  | 97  |
| a. Pendekatan Perundang-Undangan .....                                | 97  |
| b. Pendekatan Filsafat Hukum .....                                    | 98  |
| c. Pendekatan Kasus .....   | 98  |
| d. Pendekatan Konseptual .....  | 98  |
| e. Pendekatan Perbandingan Sistem Hukum .....                         | 98  |
| f. Pendekatan Sistem Hukum .....                                      | 99  |
| g. Pendekatan Politik Hukum .....                                     | 99  |
| h. Pendekatan Hukum Ekonomi .....                                     | 99  |
| i. Pendekatan Empiris .....   | 100 |
| 3. Jenis dan Sumber bahan Penelitian .....                            | 100 |
| a. Bahan-Bahan Hukum Yang Bersifat <i>Normative-preskriptif</i> ..... | 100 |
| 1. Bahan Hukum Primer .....   | 101 |
| 2. Bahan Hukum Sekunder .....   | 101 |
| 3. Bahan Hukum Tersier .....  | 102 |
| b. Pengolahan Bahan-Bahan Penelitian .....                            | 102 |
| c. Analisis Bahan-Bahan Penelitian .....                              | 103 |
| d. Penafsiran Bahan-Bahan Penelitian dan Pengambilan                  |     |

|   |     |
|---|-----|
| Kesimpulan .....  | 103 |
| <b>BAB II OTORITAS JASA KEUANGAN DAN PERLINDUNGAN</b>       |     |
| KONSUMEN JASA KEUANGAN BANK DI INDONESIA .....              | 105 |
| A. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan       |     |
| Konsumen Jasa Keuangan Bank Di Indonesia .....              | 105 |
| 1. Dasar Hukum Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam        |     |
| Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank .....              | 106 |
| 2. Wewenang Atribusi Otoritas Jasa Keuangan .....           | 112 |
| 3. Esensi Dan Ruang Lingkup Wewenang Otoritas Jasa          |     |
| Keuangan .....  | 120 |
| 4. Tujuan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan .....             | 138 |
| B. Tanggung Jawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam  |     |
| Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank di Indonesia ..... | 147 |
| 1. Dasar Hukum Tanggung Jawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan  |     |
| Dalam Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank .....        | 147 |
| 2. Kajian Tanggung Jawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan ..... | 151 |
| 3. Esensi Dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum            |     |
| Otoritas Jasa Keuangan .....                                | 160 |
| 4. Tujuan Tanggung Jawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan ..... | 162 |
| C. Konsumen Jasa Keuangan Bank di Indonesia .....           | 165 |
| 1. Dasar Hukum Konsumen Jasa keuangan Bank .....            | 165 |
| 2. Kajian Konsumen Jasa Keuangan Bank .....                 | 166 |

|   |            |
|---|------------|
| 3. Esensi Dan Ruang Lingkup Konsumen Jasa Keuangan Bank               | 169        |
| 4. Tujuan Konsumen Jasa Keuangan Bank                                 | 169        |
| <b>BAB III PENERAPAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM</b>            |            |
| <b>OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN</b>                        |            |
| <b>PERLINDUNGAN KONSUMEN JASA KEUANGAN</b>                            |            |
| <b>BANK BERBASIS KEADILAN KONSUMERISME</b>                            | <b>171</b> |
| <b>A. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Konsumen</b> |            |
| <b>Jasa Keuangan Bank</b>   | <b>171</b> |
| 1. Landasan Dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan                        |            |
| di Indonesia  | 175        |
| a. Landasan Filosofis Dalam Pembentukan Otoritas                      |            |
| Jasa Keuangan   | 175        |
| b. Landasan Sosiologis Dalam Pembentukan Otoritas                     |            |
| Jasa Keuangan   | 180        |
| c. Landasan Yuridis Dalam Pembentukan Otoritas Jasa                   |            |
| Keuangan  | 183        |
| 2. Hubungan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang                     |            |
| Perlindungan Konsumen (UU PK) dan Undang-Undang                       |            |
| Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan                    |            |
| (UU OJK)  | 187        |
| 3. Sinkronisasi Perlindungan Konsumen Dalam Perundang-                |            |
| undangan Serta Turunannya   | 193        |

|  |     |
|--|-----|
| 4. Penerapan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap<br>Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank Berdasarkan<br>Keadilan Konsumerisme ..... | 201 |
| <b>B. Tanggung Jawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan</b>  |     |
| Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan<br>Bank Berbasis Keadilan Konsumerisme .....  | 210 |
| 1. Tanggung Jawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam<br>Mewujudkan Perlindungan Konsumen .....   | 211 |
| 2. Keadilan Konsumerisme Pada Konsumen Jasa Keuangan<br>Bank .....   | 227 |
| 3. Urgensi Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank Oleh<br>Otoritas Jasa Keuangan Berbasis Keadilan Konsumerisme .....                      | 231 |

**BAB IV KELEMAHAN PENGATURAN WEWENANG DAN TANGGUNG  
JAWAB HUKUM OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM  
MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN .....**

|   |     |
|---|-----|
| <b>A. Konsep Edukasi dan Perlindungan Konsumen</b>  |     |
| Industri Jasa Keuangan Yang Telah Dilaksanakan<br>Oleh Otoritas Jasa Keuangan .....                           | 236 |
| 1. Filosofi Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Jasa<br>Keuangan Bank .....                                     | 236 |
| 2. Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia .....  | 244 |
| 3. Konstruksi Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank<br>Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ..... | 247 |



|   |     |
|---|-----|
| 4. Penerapan Konsep Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Jasa<br>Keuangan Bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan .....   | 255 |
| B. Kelemahan Pengaturan Wewenang Dan Tanggung Jawab Hukum<br>Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melindungi Kepentingan<br>Konsumen .....                    | 259 |
| 1. Kompleksitas Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Perlu<br>Mendapat Penyesuaian Dengan Undang-Undang Perbankan dan<br>Undang-Undang Bank Indonesia ..... | 259 |
| 2. Ketidaksinkronan Undang-Undang Otoritas Jasa<br>Keuangan Dengan Undang-Undang Perbankan .....  | 262 |
| 3. Tanggung Jawab Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam<br>Melindungi kepentingan konsumen Jasa Keuangan Bank ..   | 270 |
| C. Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank di Beberapa<br>Negara .....   | 281 |
| 1. Perancis .....   | 284 |
| 2. Australia .....  | 289 |
| 3. Singapura .....  | 292 |
| 4. Indonesia .....  | 297 |

|   |            |
|---|------------|
| <b>BAB V KONSEP IDEAL PENGATURAN TANGGUNG JAWAB HUKUM<br/>OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MELINDUNGI<br/>KONSUMEN JASA KEUANGAN BERBASIS KEADILAN<br/>KONSUMERISME .....</b> | <b>305</b> |
|---|------------|

|   |
|---|
| A. Pancasila Sebagai pedoman Dalam Penguatan Perlindungan |
|---|

|  |     |
|--|-----|
| Konsumen Pada Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan .....   | 305 |
| 1. Nilai Pancasila Sila Pertama Sebagai Pedoman            |     |
| Penguatan Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan .....        | 308 |
| 2. Nilai Pancasila Sila Kedua Sebagai Pedoman Penguatan    |     |
| Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan .....                  | 310 |
| 3. Nilai Pancasila Sila Ketiga Sebagai Pedoman Penguatan   |     |
| Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan .....                  | 312 |
| 4. Nilai Pancasila Sila Keempat Sebagai Pedoman Penguatan  |     |
| Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan .....                  | 313 |
| 5. Nilai Pancasila Sila kelima Sebagai Pedoman Penguatan   |     |
| Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan .....                  | 318 |
| B. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang |     |
| Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Sumber Hukum Utama Untuk    |     |
| Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank .....             | 322 |
| 1. Reposisi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Untuk     |     |
| Menjadi Sumber Hukum Utama Perlindungan Konsumen           |     |
| Jasa Keuangan Bank .....                                   | 323 |
| 2. Sinkronisasi Undang-Undang Perbankan Dengan             |     |
| Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan .....                 | 325 |
| C. Konsep Ideal Perlindungan Konsumen Jasa keuangan Bank   |     |
| Bercermin Pada Perbandingan Beberapa Negara .....          | 327 |
| 1. Nilai Yang Diambil Dari Negara Perancis,                |     |

|   |     |
|---|-----|
| Australia dan Singapura .....                               | 327 |
| 2. Konsep Yang Dapat Diambil Oleh Indonesia Bercermin       |     |
| Dari Negara Perancis, Australia Dan Singapura .....         | 329 |
| D. Implikasi Penelitian .....                               | 333 |
| 1. Implikasi Filosofis .....                                | 333 |
| a. Asas Saling Menguntungkan .....                          | 334 |
| b. Asas Perlindungan Hukum .....                            | 336 |
| c. Asas Itikad baik .....                                   | 340 |
| d. Asas Keseimbangan .....                                  | 345 |
| 2. Implikasi Teoritik .....                                 | 350 |
| a. Pengembangan Teori Keadilan Konsumerisme .....           | 350 |
| b. Fungsi Teori Keadilan Konsumerisme .....                 | 355 |
| c. Ruang Lingkup Teori Keadilan Konsumerisme .....          | 355 |
| 3. Implikasi Dogmatik .....                                 | 371 |
| a. Penyempurnaan Dan Pembentukan Hukum Positif Dalam        |     |
| Upaya Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Bank .....        | 371 |
| b. Pengaturan Layanan Perbankan Elektronik .....            | 373 |
| c. Perluasan Wewenang OJK Untuk Mewujudkan Keadilan- .....  | 375 |
| d. Penataan Praktik Beracara Terhadap Perlindungan Konsumen |     |
| Jasa keuangan Bank Oleh OJK .....                           | 387 |
| 4. Implikasi Praktek .....                                  | 388 |

|   |     |
|---|-----|
| E. Konsep Pembentukan Satu Lembaga Otoritas Jasa Keuangan   |     |
| Khusus Bank Dalam Upaya melindungi Kepentingan Konsumen     |     |
| Jasa Keuangan Bank .....                                    | 389 |
| 1. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Secara Konseptual |     |
| Di Indonesia .....  | 389 |
| 2. Kelemahan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia .....      | 394 |
| 3. Perkembangan Terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK)        |     |
| Di Indonesia Dan Konsep Pembentukan Satu Lembaga Otoritas   |     |
| Jasa Keuangan (OJK) Khusus Bank .....                       | 397 |
| BAB VI PENUTUP .....  | 407 |
| A. Kesimpulan .....   | 407 |
| B. Rekomendasi .....  | 408 |
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 410 |
| DAFTAR INDEKS.....  | 426 |
| LAMPIRAN .....  |     |